



DAFTAR ISI

1. Morfologi Cerita Rakyat Malin Tembesu Berdasarkan Struktur Naratif Propp Agatha Trisari Swastikanthi.....	1-19
2. Constructing National Identity in Indonesia – Experience for Europe Anna Grzywacz.....	20-37
3. Dominasi Maskulin versus Kesetaraan Gender Ica Wulansari.....	38-45
4. Makna Simbolik Huma (Ladang) di Masyarakat Baduy Jamaludin.....	46-54
5. Teleologi Sejarah dalam Perspektif Sekuler Mohammad Maiwan.....	55-66
6. Pemikiran dan Gerakan Pembaruan K.H. Ammar Faqih di Gresik Tahun 1902-1965 Nurudin.....	67-74
7. Pengembangan Tradisi Meramu Jamu Sehat Wanita Madura dalam Upaya Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Sri Ratnawati, Dwi Handayani, Rakhmawati.....	75-87
8. Historiografi Desa Arcawinangun di Banyumas Sugeng Priyadi.....	88-98
9. Model Pengembangan Ekowisata Berbasis Potensi Komunitas Pedusunan Wahyu Purwiyastuti, Emy Wuryani.....	99-109
10. Peradilan Keraton Surakarta di Bawah Kontrol Kekuasaan Kolonial Wahyu Purwiyastuti.....	110-116

Dominasi Maskulin versus Kesetaraan Gender (Masculine Domination versus Gender Equality)

Ica Wulansari

Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur

Jalan Ciledug Raya DKI Jakarta

Tel.: +62 (21) 5853753

Surel: ica.wulansari3@gmail.com

Abstrak

Budaya patriarki tumbuh dari dominasi maskulin dalam masyarakat. Dominasi maskulin telah menempatkan perempuan sebagai objek yang tidak memiliki hak untuk tumbuh sebagai makhluk sosial. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh pemahaman agama yang dangkal dan upaya untuk mengendalikan perempuan dalam lembaga perkawinan, yang seringkali membuat wanita para wanita menghadapi ketidaksetaraan peran sosial. Oleh karena itu, perlu adanya kritik terhadap dominasi maskulin melalui media. Media seyogyanya meningkatkan kesadaran atas kesetaraan gender untuk mempromosikan hubungan proporsional antara pria dan wanita. Film adalah salah satu media yang efektif untuk mempromosikan kesetaraan gender.

Kata kunci: dominasi maskulin, kesetaraan gender, media

Abstract

Patriarchy culture has growing ever lasting from masculine domination in the society. Masculine domination has placing women as an object who has no right to grow as social beings. It caused by understanding of religion superficially and inappropriate civilize women in the institution of marriage. So then the women deal with inequality social role. It should campaign through media to criticize masculine domination. Media propagating gender equality to promote awareness proportional relationship between men and women. The Movie is one of media which has an effective way to promote gender equality.

Keywords: gender equality, masculine domination, media

PENDAHULUAN

Ketika tengah menyusun tulisan ini, media massa tengah menyoroti pernikahan kilat Bupati Garut Aceng Fikri dengan seorang gadis belia, Fany Octora yang berusia 18 tahun. Pemberitaan di media mengangkat kronologis perkenalan Aceng dengan Fany, hingga talak cerai yang hanya berlangsung setelah empat hari pernikahan siri tersebut. Seorang kiai memperkenalkan Fany kepada Aceng, setelah sang Bupati berkonsultasi mengenai kemelut rumah tangga dan tuntutan kebutuhan biologis. Kiai melarang berzina dan menyarankan Aceng untuk menikah dan memperkenalkan calon istri dari sebuah pesantren di Garut ("Skandal Nikah Kilat Bupati" 2012). Kejadian ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak yang mengecam tindakan seorang pejabat publik yang dianggap tidak etis dalam menghormati lembaga pernikahan.

Kejadian tersebut merugikan pihak perempuan. Terutama bagi perempuan dari kalangan ekonomi rendah. Dalam kejadian tersebut, Fany bersedia menerima pinangan Aceng dengan jaminan dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan

tinggi. Dalam beberapa wawancara langsung di media televisi nasional, Fany menyatakan menikah tanpa paksaan dengan bermodalkan perkenalan yang difasilitasi oleh seorang kiai. Dengan polos, Fany pun mau menikah dengan Aceng karena status duda yang diakui oleh Aceng. Ketika ditanyakan presenter televisi mengenai bukti bahwa Aceng seorang duda, Fany menyatakan tidak mengetahuinya. Bahkan, dalam satu wawancara, dengan gamblang terlihat Fany tidak mengetahui risiko pernikahan siri.

Di sisi lain, Aceng Fikri terlihat sangat percaya diri dan tidak terlihat gurat penyesalan akibat tindakannya terhadap Fany. Dalam siaran interaktif yang disiarkan secara langsung di beberapa televisi nasional, Aceng mengatakan alasan menceraikan Fany karena Fany dianggap sudah tidak perawan. Bahkan dalam pernyataannya, Aceng mengatakan menikah diibaratkan dengan jual beli, kalau tidak sesuai keinginan, maka barang dapat dikembalikan. Kemudian Aceng mengatakan telah memberikan uang sebesar Rp 120 juta kepada Fany. Dengan tanpa malu-malu, Aceng mengatakan meniduri Fany satu malam menghabiskan banyak uang, sementara tidur dengan artis belum tentu semahal itu.

Contoh kasus pernikahan siri yang dilakukan Aceng Fikri merupakan sekelumit gambaran kecil yang terjadi di negara ini. Dominasi budaya patriarki menyebabkan ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan terutama dalam lembaga pernikahan. Dalam contoh kasus tersebut, seorang laki-laki yang memiliki kekuasaan dapat dengan mudah mendominasi pihak perempuan. Maka ketika budaya patriarki berkembang dalam lembaga pernikahan, pihak wanita dituding sebagai sumber permasalahan, sementara pihak laki-laki berlindung dengan pbenarannya. Simone De Beauvoir dalam bukunya *The Second Sex* berargumen bahwa perempuan selama ini terkungkung dalam imanensi ini oleh laki-laki yang telah mengklaim kualitas transedensi bagi mereka sendiri: 'Hal ini merupakan nasib yang ditetapkan bagi perempuan dalam sistem patriarki (Thornham 2010:47).

Dalam kajian feminisme, feminis menggugat dominasi laki-laki. Laki-laki adalah pasar, permintaan. Perempuan adalah persediaan; diri perempuan itu sendiri merupakan satu-satunya benda ekonomi yang dimilikinya diberikan dalam pertukaran dengan jaminan dukungan legal seumur hidup yaitu pernikahan (Thornham 2010: 27). Terwujudnya pola hubungan laki-laki dan perempuan dalam tataran ini, perempuan dijadikan sebagai objek pemuas syahwat laki-laki. Ketika laki-laki melakukan pernikahan siri untuk kebutuhan biologis, begitu pula laki-laki dapat mencampakkan perempuan yang menjadi istri sirinya apabila tidak lagi dapat memenuhi syahwat sang laki-laki. Bahkan alasan budaya maupun dalil-dalil agama dapat menjadi senjata bagi laki-laki untuk melakukan kesewenang-wenangan.

METODE

Metode merupakan cara kerja yang ditempuh dalam setiap penelitian untuk mencapai tujuan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

Penelitian ini diawali dengan mendiskusikan budaya maskulin di Indonesia. Selanjutnya menganalisis sejumlah produk budaya di media massa yang memperlihatkan adanya dominasi budaya maskulin sekaligus bagaimana isu kesetaraan gender dihadirkan di dalam produk-produk budaya tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dominasi Kekuasaan Maskulin

Dari pengamatan penulis, terdapat rekonstruksi budaya maskulin yang sistematis terhadap perempuan. Perempuan yang lemah secara ekonomi tidak memiliki akses untuk dapat memilih hal-hal yang sesuai dengan keinginannya. Perempuan tersebut menjadi tidak berdaya dan pasrah ketika mengalami tindakan kesewenang-wenangan dari kaum lelaki. Lingkungan pihak perempuan tidak melakukan proteksi terhadap perempuan sebelum pernikahan terjadi. Pertimbangan usia dan kesiapan mental seharusnya menjadi pertimbangan sadar dari pihak orang tua maupun lingkungan pihak keluarga. Selain itu, pihak penjaga moral dalam hal ini pemuka agama seakan menjadi pembuat kebijakan yang tepat. Upaya perjodohan yang difasilitasi pemuka agama tidak menjadi jaminan untuk pilihan yang baik bagi perempuan.

Sementara itu, dari pihak lelaki yang memiliki kekuasaan dapat bertindak sesuai kehendaknya. Ketiadaan perlindungan hukum terhadap pernikahan siri, proteksi lingkungan terhadap perempuan yang rendah, dan kekuatan materi yang menjadi kekuasaan pihak lelaki dapat dengan mudah mendudukkan perempuan di pihak tertindas. Margaret Davies mengatakan bahwa bentuk ideologi secara umum dari patriarki direproduksi dalam hukum itu sendiri, dimana substansi dari kategori hukum telah mengabaikan perhatian yang diperlukan oleh perempuan. Implementasi hukum adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin sehingga karakter hukum bersifat patriarki (Savitri 2008:18). Dengan dominasi maskulin, perempuan dianggap sebagai barang yang dapat diperjual belikan walaupun melalui institusi pernikahan. Sehingga sang lelaki dapat memperlakukan sesuai keinginannya. Menjadi jelas dominasi hubungan sosial melengkapi dampak dan akibat, pelaksanaan sistem berhubungan dengan tergantungnya hubungan kekuasaan yang dapat meningkatkan kesadaran (Bourdieu 2001:8).

Budaya lokal seringkali memiliki nilai-nilai kearifan, namun mengalami penyelewengan demi kepentingan dominasi maskulin. Bahkan penafsiran agama yang sempit mengalami penyelewengan untuk kepentingan dominasi maskulin. Dominasi maskulin semakin kuat manakala memiliki pengaruh politik dan berkuasa. Maka realitas sosial mengikuti pembudayaan yang sudah dibentuk oleh dominasi maskulin. Clifford Geertz mempertanyakan dalam diskusi antara kekuasaan dan dominasi yang menjadi anatomi dalam kebudayaan. Budaya adalah sesuatu yang tidak hanya terletak di luar praktek sosial dan hubungan manusia tetapi di mana terjadinya di lapangan. Maka kekuasaan, eksploitasi, manipulasi aspek budaya menyeluruh daripada kedekatan pengawasan yang layak. Kebudayaan berarti dihasilkan manusia bersaing dengan medan lainnya yang dicirikan oleh dominasi dan persamaan (Wayne dan Moore 1993:xi).

Pendapat lainnya yaitu dari Virginia Wolf mengatakan bahwa identitas dibangun melalui budaya tetapi selalu terejawantahkan. 'Hukum-hukum tak tertulis' masyarakat yang dibangun dalam budaya adalah pada suatu tingkatan produk tubuh kita, dan terdapat dua jenis tubuh, jantan dan betina. Bagi perempuan, yang baginya tubuh direpresi oleh dan dalam wacana patriarki, identitas dirasakan sebagai sesuatu yang patah (Thornham 2010:41-42). Budaya tersebut membangun sistem dan pola pikir masyarakat mengenai relasi laki-laki dan perempuan. Standar kelayakan sebagian besar ditekankan kepada kaum perempuan, sementara pihak laki-laki tidak harus mengalami skala kelayakan yang proporsional. Contohnya seperti pemilihan calon istri, pihak laki-laki secara dominan menginginkan perempuan yang masih perawan sebagai acuan moral. sementara pihak laki-laki tidak dibebankan syarat itu. Kemudian ketentuan istri harus patuh kepada suami berdasarkan ajaran agama, dipahami secara sempit sehingga menyebabkan istri memiliki batasan-batasan yang mempersempit ruang geraknya sebagai makhluk sosial.

Budaya patriarki yang menindas perempuan mendapatkan kritisi dari pemikir-pemikir feminis. Feminis menurut Jacques Derrida membeli ilusi kastrasi dimana perempuan sekaligus melawan yang bukan perempuan dan perempuan itu sendiri. Dalam hal ini, Derrida mengkritik bentuk feminisme yang terus menerus mendasarkan seluruh argumennya pada sistem patriarki dan menginginkan feminisme juga kritis terhadap dirinya sendiri (Arivia 2003:167). Dalam prinsip hubungan dominasi terutama lingkup domestik terjadi perdebatan feminis. Terutama perdebatan mengenai dominasi maskulin. Maka kaum feminis memusatkan perhatian terhadap lembaga terutama sekolah ataupun negara, di mana prinsip-prinsip dominasi harus dikembangkan menjadi perjuangan kaum feminis dalam perjuangan politik melawan segala bentuk dominasi (Bourdieu 2001:4).

Media dan Kesetaraan Gender

Untuk melawan dominasi maskulin, diperlukan konstruksi pemahaman gender dengan baik. Gender adalah sifat laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural, sehingga tidak identik dengan seks. Pesifatan (simbolisasi) dalam gender ini sangat terkait dengan sistem budaya maupun struktur sosial dalam suatu masyarakat. Sementara sifat-sifat cantik, emosional, keibuan dan lain-lain yang diberikan kepada perempuan serta sifat-sifat kuat, rasional, perkasa kepada laki-laki adalah gender. Perubahan ciri dan sifat gender ini bisa terjadi dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat yang lain tergantung sistem sosial budaya yang berlaku di tempat masing-masing tempat. Semua sifat dan ciri yang bisa dipertukarkan inilah yang disebut dengan konsep gender (Fakih 2001:6).

Pemahaman gender berkaitan dengan peran dan tanggung jawab sosial laki-laki dan perempuan. Perempuan memiliki kesetaraan sebagai makhluk sosial untuk berperan dalam kehidupan sosialnya. Ketimpangan peran perempuan menyebabkan perempuan menjadi 'warga negara kelas dua'. Namun seiring perjalanan waktu, kesadaran akan kesetaraan gender semakin membaik. Dengan indikasi perempuan saat ini banyak menempati jabatan strategis dengan kemampuan yang setara dengan kaum laki-laki. Namun yang menjadi perhatian dalam konstruksi gender adalah

kekerasan yang menimpa perempuan. Ada beberapa penyebab yang menjadi asumsi terjadinya kekerasan terhadap perempuan (Savitri 2008:18): (1) adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahwa seringkali tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar; (2) hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias gender. Seringkali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Menurut teori penindasan gender, situasi perempuan pada dasarnya hanyalah digunakan, dikendalikan, ditaklukkan, dan ditindas oleh lelaki. Pola penindasan ini masuk dalam organisasi masyarakat yang terdalam dan paling meresap dalam struktur dominasi mendasar yang disebut patriarki. Patriarki bukanlah akibat sekunder dan tidak diharapkan dari sekumpulan faktor lain seperti biologi atau sosialisasi atau peran menurut jenis kelamin atau sistem kelas. Patriarki adalah struktur kekuasaan primer yang dilestarikan dengan maksud yang disengaja.

Untuk mengkampanyekan kesetaraan gender diperlukan media yang dapat melakukan sosialisasi. Media memegang banyak arti yang pada gilirannya menawarkan bahan baku untuk multitafsir. Ini memberdayakan para penonton untuk menciptakan makna melalui belajar formal, pengalaman hidup, kesadaran kritis, dan pemikiran independen untuk pengalaman menafsir media (Holtzman 2000:35). Dalam mengkaji isi media, Gans (1979) dan Gitlin (1980) mengelompokkan pendekatan ini ke dalam beberapa kategori, yaitu: (1) isi media merefleksikan realitas sosial dengan sedikit atau tanpa distorsi. Pendekatan minor ini beranggapan bahwa apa yang disiarkan media merupakan refleksi akurat tentang kenyataan sosial kepada audiens; (2) isi media dipengaruhi oleh sosialisasi dan sikap pekerja media. Pendekatan *communicator centered* mengatakan bahwa faktor psikologis pekerja media membuat mereka memproduksi realitas sosial dimana terdapat norma ikatan sosial, ide, atau perilaku yang berbeda diasingkan; (3) isi media dipengaruhi oleh rutinitas isi media. Pendekatan ini menyatakan bahwa isi media dipengaruhi oleh bagaimana pekerja media dan perusahaan mengorganisasikan diri mereka; (4) isi media dipengaruhi oleh institusi sosial dan tekanan lainnya. Menurut pendekatan ini, faktor-faktor eksternal seperti ekonomi, tekanan budaya dan audiens menentukan isi; (5) isi merupakan fungsi dari posisi ideologi dan fungsi mempertahankan status quo.

Maka isi media dapat mempengaruhi pola pikir khalayak apabila pesan mengalami pengulangan dan khalayak mengikuti pesan media berulang-ulang. Beragam jenis media massa dapat menyebarkan pesan secara efektif. Salah satu jenis media massa yaitu film. Film menjadi media massa sesungguhnya dalam artian bahwa film mampu menjangkau populasi dalam jumlah besar dengan cepat (McQuail 2011:35). Di antara beragam jenis media massa, film menjadi pilihan menyebarkan pesan secara tidak langsung melalui jalan cerita. Film merupakan pernyataan budaya yang melakukan komunikasi pesan dari pembuat film kepada penonton ke seluruh daerah atau nasional, bahkan dunia. Media mempertunjukkan situasi dan hubungan antara

manusia, hal ini menjadi bagian menarik dalam drama yang tidak dapat dilihat bagaimana realitas sesungguhnya (Gauntlett 2008:2).

Dikaitkan dengan kesetaraan gender, film dapat menjadi cermin realitas sosial yang tengah berlaku di masyarakat. Walaupun saat ini, beberapa film bergenre pemahaman gender, namun jumlahnya sangat terbatas. Hal tersebut terkait erat dengan dominasi maskulin. Peranan ideologi patriarki yang melatarbelakangi representasi perempuan di media tidak bisa dilepaskan dari kepentingan kapitalisme pemilik modal. Ideologi kapitalisme juga memiliki andil dalam penempatan posisi perempuan di media, dengan memakai perempuan sebagai objek dari film, iklan ataupun berita, mereka mengeksploitasi perempuan demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya (Destina 2011:68).

Kesetaraan Gender dalam Film *Perempuan Berkalung Sorban*

Indonesia pada masa Orde Reformasi memiliki perubahan yang signifikan dalam film karya sineas dalam negeri. Film-film Indonesia mulai berani menampakkan hal-hal yang sebelumnya dianggap tabu oleh masyarakat. Dimulai dari tema cerita untuk remaja maupun dewasa yang mengangkat realitas masyarakat modern saat ini. Film pada masa pasca Orde Baru tidak lagi melakukan kontrol terhadap perempuan. Dalam film pasca Orde Baru, isu mengenai poligami juga peran perempuan yang tidak terbatas di ruang publik. Pada masa Orde Baru, stereotipe terhadap perempuan sebagai ibu rumah tangga, sementara pada masa pasca orde baru sosok perempuan menjadi representasi perempuan modern (Schmidt 2012:45). Beberapa film mengenai poligami *diantaranya Berbagi Suami, Ayat-Ayat Cinta dan Perempuan Berkalung Sorban*. Di antara beberapa film tersebut, penulis memilih film berjudul *Perempuan Berkalung Sorban*. Dengan alasan, film ini cukup menarik dan tersirat pesan dan pemikiran kritis mengenai pemahaman seorang perempuan yang terkungkung dogma agama dan budaya patriarki.

Dari beberapa referensi film yang bertema kesetaraan gender, terdapat sebuah film produksi tahun 2009 yang merupakan karya sutradara Hanung Bramantyo yang berjudul *Perempuan Berkalung Sorban*, yang penulis cermati sebagai film yang memiliki pesan yang cukup kuat. Film ini cukup berani mengkritisi sistem sosial budaya yang berlaku tidak adil bagi perempuan. Bahkan penggunaan simbol agama dalam film tersebut menjadi pesan bahwa penafsiran yang dangkal akan pemahaman agama menjadi upaya untuk melanggengkan dominasi maskulin.

Film *Perempuan Berkalung Sorban* merupakan adaptasi dari novel berjudul sama yang ditulis oleh Abidah El Khalieqy. Film ini menyajikan latar belakang kehidupan sebuah pesantren. Film ini menjadi menarik dengan tokoh utama bernama Anissa dengan pergulatan batinnya. Anissa merupakan perempuan yang cerdas, kritis dan memiliki pendirian yang kuat. Anissa yang dibesarkan di lingkungan pesantren dan tumbuh dalam kehidupan keluarga Kyai yang konservatif. Anissa menerima ajaran bahwa perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Namun, Anissa memiliki persepsi yang lain terhadap hubungan perempuan dan laki-laki yang seharusnya sejajar.

Selain itu, Anissa harus menerima pinangan Samsudin, yang merupakan anak seorang Kyai. Sekalipun hati Anissa berontak, Anissa tetap harus menghadapi pernikahannya dengan Samsudin. Dalam mengarungi biduk rumah tangga, Anissa seringkali menerima kekerasan verbal dan fisik dari suaminya, Samsudin. Selain itu, Samsudin pun menikahi perempuan lain tanpa seizin Anissa. Anissa menyimpan cita-cita untuk sekolah hingga ke perguruan tinggi. Cita-cita yang ditolak oleh ayah Anissa yang bersikeras menikahkan Anissa dengan Samsudin. Dalam perjalanannya, Anissa berhasil menggapai mimpinya, setelah bercerai dengan Samsudin dan menikah dengan lelaki pilihannya. Kemudian Anissa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Setting cerita dalam film, ditutup dengan kembalinya Anissa ke pesantren milik ayahnya.

Dalam film tersebut mengangkat permasalahan marginalisasi terhadap perempuan. Film itu memberikan gambaran perjuangan Anissa untuk menggapai cita-citanya dan upaya untuk melawan marginalisasi dengan kritis. Film tersebut menawarkan gagasan kepada khalayak mengenai kebebasan perempuan untuk menentukan nasib. Media memuat gambaran laki-laki dan perempuan, juga memuat pesan mengenai laki-laki dan perempuan. Media secara langsung dan berdampak secara luas kepada khalayak melalui pesan yang terandung dalam isi media (Gauntlett 2008:1).

Argumen Juliet Mitchell bahwa kunci bagi penindasan atas perempuan terletak dalam “peran ideologis dan sosio ekonomi sebagai ibu dan pengurus rumah tangga” diambil dan dikembangkan oleh kelompok kajian perempuan. Subordinasi perempuan ditopang melalui “hegemoni maskulin” yang beroperasi pada lokasi “keluarga sebagai unit ekonomi” (Thornham 2010:26). Dalam film *Perempuan Berkalung Sorban*, khalayak disuguhi cerita ketika Anissa dipandang rendah karena tidak dapat mengandung ketika menikah dengan Samsudin. Selain itu, Anissa berperan sebagai ibu rumah tangga yang diharuskan mengurus rumah tangga tanpa diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas lain.

SIMPULAN

Dominasi maskulin dalam kehidupan bermasyarakat mengakibatkan ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dominasi maskulin secara nyata terlihat dalam bentuk budaya patriarki yang mengunggulkan kedudukan laki-laki dibandingkan perempuan. Budaya patriarki dalam lembaga pernikahan menempatkan perempuan dalam peran domestik dengan segala ketentuan yang mengikat perempuan. Dominasi maskulin dapat direkonstruksi melalui paham kesetaraan gender.

Penekanan peran dan tanggung jawab sosial dalam bermasyarakat yang melibatkan laki-laki dan perempuan yang didasari hak dan kewajiban agar terjadi keseimbangan hubungan laki-laki dan perempuan. Dominasi maskulin berupaya menjadikan laki-laki yang memiliki kekuasaan terhadap perempuan. Bahkan sistem yang membudayakan perempuan menjadi kelompok marjinal. Menjadi marjinal, karena hak-hak sebagai makhluk sosial terampas dengan dalih dogma agama yang

dipahami secara sempit. Perempuan memiliki status hukum yang sama sebagai warga negara.

Kesetaraan gender dapat dikampanyekan melalui media. Salah satunya melalui film, karena film merupakan media yang efektif menyampaikan pesan. Film yang bertema kesetaraan gender berupaya membangun persepsi bagaimana membangun hubungan yang menghargai hak-hak perempuan setara dengan laki-laki. Selain itu, cerita dalam film yang seringkali bersifat fiksi namun terkandung realitas sosial. Kandungan realitas sosial berupaya ditampilkan untuk membangun kesadaran penghargaan terhadap hak hidup perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal.
- Bourdieu, Pierre. 2001. *Masculine Domination*. California: Stanford University Press.
- Destina, Tri. 2011. "Analisis Wacana Kritis Sara Mills Mengenai Perempuan Sebagai Pelacur Dalam Film *Virgin 2*." Jakarta: Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka.
- Fakih, Mansour. 2001. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gauntlett, David. 2008. *Media, Gender and Identity an Introduction*. New York: Routledge.
- Holtzman, Linda. 2000. *What Film, Television, and Popular Music Teach Us About Race, Class, Gender and Sexual Orientation*. New York: ME Sharpe.
- McQuail, Denis. 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Savitri, Niken. 2008. *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama.
- Schmidt, Leonie. 2012. "Post-Suharto Screens: Gender Politics, Islam and Discourse of Modernity." *Amsterdam Social Science* 4 (1): 29-48.
- "Skandal Nikah Kilat Bupati." 2012. *Majalah Detik*, 3 Desember.
- Thornham, Sue. 2010. *Teori Feminis dan Cultural Studies Tentang Relasi yang Belum terselesaikan*. Jogjakarta: Jalasutra.
- Wayne, Valerie, dan Cornelia Moe (Ed). 1993. "Translation/Transformation: Gender and Culture in Film and Literature East and West." Dalam *Selected Conference Papers Literary Studies East and West*. Hawaii: University of Hawaii and East West Center.